

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan tujuan penting dalam perekonomian. Fungsi dan tujuan Bank Umum Syariah meliputi kemakmuran ekonomi yang meluas, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Selain itu, bank umum syariah menjadikan Indonesia negara yang menganut dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan dengan bunga, sedangkan bank syariah didasarkan pada konsep Islam yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil baik untung maupun rugi. Tujuan utama Bank Syariah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.²

Pada dasarnya, lembaga keuangan seperti bank maupun non-bank berperan penting untuk mendukung perekonomian setiap masyarakat, baik masyarakat berpenghasilan besar maupun kecil untuk mendukung usahanya, dan salah satu

² A. Nur .F., dan S. Anam, “Pengaruh Pengetahuan Produk terhadap Perilaku Memilih Lembaga Keuangan Syariah dengan Sikap terhadap Produk Sebagai variabel Intervening”, *EL-Qist*, 08(01), 2018, hal. 1525-1526

permasalahan yang di alami hampir semua negara, termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Di Indonesia berbagai seminar dan pertemuan telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya dengan memudahkan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan untuk semua kalangan.

Inklusi keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Negara Indonesia. Mengingat banyaknya manfaat dari inklusi keuangan yaitu salah satunya dapat mendorong pertumbuhan pendapatan yang dapat memberikan dampak stabilitas sistem keuangan dan penurunan tingkat kemiskinan. Setiap individu berhak untuk mengakses seluruh kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Namun, sebagian masyarakat masih belum sadar akan manfaat yang dimiliki dari inklusi keuangan. Masyarakat yang tidak paham akan hal tersebut biasanya didapati dalam masyarakat yang kurang paham akan teknologi dan juga didapati pada orang yang sudah lanjut usia. Pentingnya dalam menggunakan layanan *mobile money* telah disadari oleh masyarakat maupun organisasi modern dalam era globalisasi, yang mana hal tersebut seseorang diharapkan mampu untuk semakin kompetitif dalam bidangnya.³

Istilah *financial inclusion* atau inklusi keuangan menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid*. Pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat

³ M. Awal Satrio Nugroho, *Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (UII Yogyakarta: Skripsi, 2021), hal. 1

pinggiran. Perbandingan persentase nilai inklusi keuangan tahun 2022 ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode sebelumnya di tahun 2019 yaitu sebesar 76,19 persen.⁴

Pada dasarnya program keuangan inklusif ini sangatlah baik, karena memang pada dasarnya saat ini Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses untuk menikmati pelayanan jasa keuangan dari lembaga keuangan yang ada. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi masyarakat masih kurang merata atau masih banyak yang miskin. Dengan adanya keuangan inklusif diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka dengan memanfaatkan layanan jasa keuangan agar dapat mendukung permodalan kegiatan usaha mereka khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Hambatan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan adalah tingginya *unbankable* (tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank) yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan, rendahnya pembiayaan UMKM, tingginya suku bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen UMKM, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan, hal tersebut yang menjadikan penerapan inklusi keuangan penting mengatakan bahwa yang menjadi faktor usaha kecil lebih sering menggunakan modal sendiri, keluarga, kerabat, bahkan rentenir dalam menjalankan usahanya karena rendah atau sulitnya akses usaha kecil terhadap lembaga keuangan formal, dan tingkat suku bunga perbankan.

⁴ Tegar Wahyu Sutanto dan Tetty Widiyastuti, "Peran Inklusi Keuangan Berkaitan dengan Produktifitas UMKM yang Menjadi Agen46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar", *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 5(2), 2020, hal. 116

Sektor ekonomi di Indonesia secara nyata dan secara mayoritas didukung oleh sektor UMKM. UMKM mempunyai peranan positif dalam memelihara keseimbangan ekonomi dan pembangunan sosial, menurunkan pengangguran, menciptakan peluang kerja, dan dengan fleksibilitas produksinya dapat mengikuti perubahan kondisi pasar secara efektif. UMKM menjadi pemain ekonomi yang tidak bisa diremehkan perannya. Dalam pengembangan ekonomi daerah yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan UMKM lokal yang sesuai potensinya menjadi sangat penting. UMKM memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Namun, dalam hal ini kinerja UMKM masih tergolong rendah. Salah satu penyebab rendahnya kinerja UMKM adalah karena kurangnya akses pemodal. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut:⁵

Tabel 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2020,2021,2022
(Dalam Miliar Rp)

Tahun	Modal Kerja	UMKM	NPF	NON-UMKM	NPF
2020	114,908	42,879	2,977	72,029	2,805
2021	112,969	45,851	2,897	67,118	2,198
2022	127,045	46,565	2,988	80,480	2,465

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2022

⁵ Statistik Perbankan Syariah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sektor ekonomi masih mendominasi pembiayaan non-UMKM dibandingkan dengan UMKM. Meskipun pembiayaan mendominasi pada non UMKM namun, setiap tahunnya pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah mengalami peningkatan. Sehingga dari sini bisa diketahui bahwa bank umum syariah sudah mampu mengimplementasikan inklusif keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bank Umum Syariah atau BUS dalam mengimplementasikan inklusif keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung memiliki tujuan untuk memberikan dorongan pada sistem keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga atau terlepas dari unsur riba, gharar, dan sebagainya dan diharapkan mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkualitas. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Daerah ini memiliki banyak usaha yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan dan juga desa dengan berbagai aneka macam produk komoditas yang bermacam-macam. Kecamatan Karangrejo adalah salah satu kecamatan di Tulungagung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri di sebelah Barat Laut. Kecamatan Karangrejo terdiri dari 13 desa dengan total luas wilayah 35,54 km². Kecamatan Karangrejo dihuni oleh masyarakat yang memiliki usaha cukup banyak dan kreatif

mulai dari tralis (usaha bengkel las), mebel, pengrajin tas, pengolahan hasil tani, peternak, dan lain sebagainya.⁶ Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memang tidak bisa diragukan lagi, Namun, disisi lain UMKM juga menghadapi permasalahan atas rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal dalam mengembangkan usahanya sehingga terjebak dalam jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Maka peran inklusi keuangan harus diterapkan secara gencar pada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan dorongan pada sistem keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh setiap golongan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terhalu oleh Moh.Zaki Kurniawan dan M. Boy Singgih Gitayuda yang telah dibaca sebelumnya menjelaskan tentang dimensi inklusi keuangan yang hasilnya bahwa semakin baik suatu pelayanan, akses permodalan, dan pendampingan sangat berpengaruh dalam perkembangan UMKM di Madura. Sedangkan hasil penelitian dari Wira Iko Putri Yanti menunjukan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan inklusi keuangan. Dari pemaparan berbagai teori yang sudah dijelaskan, dinyatakan bahwa memang sebuah usaha akan bisa berkembang dengan maksimal apabila adanya kemudahan akses perbankan. Oleh karenanya diperlukan penerapan inklusi keuangan bank umum syariah yang diukur dari pelayanan, akses permodalan dan pendampingan terhadap perkembangan kinerja

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, *Potensi Pengembangan Wilayah*, hal. 8-10

UMKM secara merata ke setiap masyarakat agar usaha yang ada di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung bisa berkembang lebih baik. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan judul **“Pengaruh Inklusi Keuangan Bank Umum Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti menentukan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas. Adapun untuk rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah akses permodalan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah pendampingan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pelayanan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk menguji pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk menguji pengaruh pendampingan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua khalayak, beberapa kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan pengembangan ilmiah mengenai ilmu inklusi keuangan bank syariah khususnya pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dalam kemudahan akses lembaga keuangan dalam mengembangkan modal usaha yang dijalankannya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berkontribusi bagi pelaku UMKM mengenai adanya suatu lembaga kredit formal untuk menghindari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman

dengan bunga yang sangat tinggi guna untuk mengembangkan keberhasilan usaha yang terarah.

b. Bagi Akademik

Untuk memberikan tambahan referensi rujukan bagi mahasiswa mengenai kinerja UMKM atas adanya peran inklusi keuangan bank umum syariah dan dapat memberikan tambahan wawasan maupun informasi untuk siapapun yang membaca.

c. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk bahan penelitian sejenis maupun untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini berisi bahan informasi mengenai peran inklusi keuangan bank umum syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM masyarakat Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Ruang lingkup dan keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan objek pelaku UMKM masyarakat Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan fokus pada pengaruh dimensi inklusi keuangan yang diukur melalui pelayanan, akses permodalan, dan pendampingan terhadap kinerja UMKM masyarakat Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

2. Pada penelitian terdahulu terdapat banyak variabel namun penelitian ini akan membatasi beberapa variabel menjadi variabel independen dan dependen. Adapun yang menjadi variabel independen adalah pelayanan, akses permodalan, dan pendampingan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kinerja UMKM.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah tafsir dalam memahami judul diatas, maka peneliti memberikan sedikit penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Inklusi keuangan dikatakan berhasil apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan akan memberikan jasa keuangan yang tepat pada tiap individu dan memberikan pemahaman akan akses terhadap jasa keuangan. Inklusi keuangan memberikan ruang gerak bagi jalannya intermediasi keuangan termasuk diantaranya dalam transaksi pembayaran, produk keuangan yang sesuai dengan kemampuan keuangan rumah tangga miskin, fasilitas transfer uang, kredit mikro dan jasa keuangan lainnya termasuk

asuransi. Inklusi keuangan keuangan dapat diukur melalui tiga cara, yaitu:

(1) pelayanan (2) akses permodalan (3) pendampingan.⁷

b. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah ini setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.⁸

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kegiatan tersebut meliputi agribisnis, industri manufaktur, sumberdaya manusia, dan bisnis kelautan.⁹

d. Kinerja UMKM

Kinerja UMKM adalah salah satu sasaran yang paling penting dari manajemen keuangan yaitu untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik dan juga memaksimalkan nilai perusahaan. Kinerja UMKM dapat dicapai

⁷ Adhitiya Wardhono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qori'ah, *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (Jember: Pustaka Abadi, 2017), hal. 6

⁸ Muhamad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), hal. 35

⁹ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 1

oleh individu dan menyesuaikan dengan peran atau suatu periode waktu tertentu yang dihubungkan atas suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari setiap perusahaan.¹⁰

2. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap judul penelitian agar tidak salah pengertian. Jadi maksud dari peran inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM yaitu bahwa adanya inklusi keuangan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses jasa perbankan dalam hal pembiayaan yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya serta mendukung perekonomian suatu daerah, dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami, maka peneliti membuat sistematika penulisan sesuai dengan pedoman skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan/pengesahan pembimbing, halaman pernyataan keaslian, motto,

¹⁰ Nina Fadila, Nur Aliah, Hidayati Purnama Lubis, *Pengaruh Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hal.11

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: pada bab ini akan membahas sub bab pendahuluan, yaitu: a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, f) Penegasan Istilah, g) Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Landasan Teori: Pada bab ini berisi tinjauan atau kajian teori dan penelitian sebelumnya. Di antara variabel dimensi yang dibahas dalam bab ini adalah teori-teori dari variabel yang diambil yaitu pelayanan, akses permodalan, dan pendampingan terhadap kinerja UMKM serta penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini, dan membahas kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang memiliki sub-bab, antara lain: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Populasi, *sampling* dan sampel penelitian, c) Sumber data, variabel, skala pengukuran, d) Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, e) Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini berisi pembahasan yang membahas hasil penelitian tentang topik penelitian. Pada bab ini, pembahasan dilakukan

dengan menganalisis data dan mengembangkan ide berdasarkan bab-bab sebelumnya.

Bab VI Penutup: Pada bab ini berisikan tentang penutup yang dalam bab ini akan dipaparkan atau kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Bagian akhir, dari laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.